

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pemerintahan yang baik dan bersih merupakan impian warga negara Indonesia. Masyarakat berharap pemerintah dapat membangun negara dengan tata kelola yang baik dan berkualitas. Hal ini ditandai dengan adanya kualitas etika yang dimiliki oleh para pegawai di suatu organisasi. Kualitas etika yang baik ditandai dengan adanya perilaku yang baik dan penurunan pada tingkat pelanggaran etika. Penyimpangan etika yang dilakukan oleh seorang akuntan telah menyebabkan keruntuhan perusahaan di seluruh dunia yang berdampak pada perekonomian global (Obloh, 2019).

Kasus kebangkrutan perusahaan besar di dunia seperti Lehman Brothers dan kasus manipulasi keuangan pada PT Garuda Indonesia Tbk telah merugikan perusahaan pada sektor keuangan. Hal tersebut membuat kita sadar akan pentingnya etika yang harus dimiliki oleh para pegawai di perusahaan, terutama oleh seorang akuntan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan perusahaan. Perilaku tidak etis akuntan juga terjadi di Nigeria, seperti pada perusahaan Dunlop Nigeria Plc dan pencucian dana publik. Hal ini dapat terjadi karena rendahnya integritas moral dan dapat menyebabkan tekanan pada perusahaan karena perusahaan terancam bangkut (Obloh, 2019).

Etika dalam pengambilan keputusan perusahaan tidak boleh diabaikan karena akan berdampak pada perilaku etis. Pemerintah perlu turut serta dalam penerapan perilaku etis agar individu dapat memiliki sikap etis. Pengendalian terkait penyelenggaraan kegiatan di pemerintahan harus dilakukan oleh pemerintah, khususnya pada sektor keuangan guna terciptanya keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab terhadap masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah harus mampu membangun citra yang baik di masyarakat guna meningkatkan kepercayaan masyarakat (Sudaryati & Agustia, 2019).

Dalam lingkungan bisnis saat ini, setiap organisasi memiliki budaya organisasi guna mencapai tujuan organisasi. Salah satu budaya organisasi yaitu budaya beretika, dimana setiap individu harus memiliki etika yang baik. Hal ini bertujuan untuk melindungi aset organisasi dan memberikan keamanan dalam pengambilan keputusan yang efektif (Hopkins & Deepa, 2018). Etika berperan penting dalam pengambilan keputusan organisasi karena persaingan bisnis yang tajam. Mereka mampu melakukan segala cara untuk mewujudkan keinginan mereka. Hal ini tentu akan berdampak pada profesi akuntan karena harus menghadapi tantangan yang lebih sulit di masa mendatang (Asri & Manuhara, 2009). Etika budaya organisasi akan membentuk moralitas individu dengan cara memprioritaskan perilaku etis dan kebenaran. Demikian juga integritas yang dimiliki individu akan berkembang dalam organisasi seiring meningkatnya perilaku etis (Khusnah & Soewarno, 2022).

Faktor yang mendasari seseorang untuk berbuat perilaku tidak etis yakni berasal dari faktor internal dan eksternal individu itu sendiri. Salah satunya yaitu adanya tekanan dari atasan dapat mempengaruhi individu untuk melakukan penyimpangan etika (Mohd Ghazali, 2021). Individu tersebut akan mematuhi perintah atasannya untuk melakukan tindakan tidak etis karena ia merasa tidak harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya (Sofyani & Pramita, 2013). Selain itu, adanya kepentingan manajer untuk mencapai target keuntungan yang didapatkan perusahaan dapat menjadi pemicu individu untuk melakukan tindak perilaku tidak etis (Pasaribu et al., 2020).

Hal yang dapat diterapkan oleh pemerintah terkait perilaku etis yakni dengan cara memberlakukan kode etik, peraturan etika organisasi, atau mewajibkan mata kuliah etika profesi akuntansi pada program studi akuntansi. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mohd Ghazali (2021) meneliti tentang penerapan sikap etis yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia agar para pegawai berperilaku etis. Pemerintah Malaysia memastikan agar para pegawai dapat mematuhi standar etika melalui kode etik tata kelola perusahaan. Hal ini diharapkan agar karyawan dapat lebih terstruktur dan disiplin dalam beretika di perusahaan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Mohd Ghazali (2021) mengungkapkan bahwa nilai etika memiliki hubungan positif signifikan terhadap penilaian etis. Pengaruh lingkungan etis sangat penting diterapkan pada suatu perusahaan karena akuntan yang

memiliki nilai etika yang tinggi, maka akan memiliki sikap etis dalam pengambilan keputusan perusahaan. Perusahaan harus memberlakukan peraturan kepada para karyawan agar proses dan transaksi keuangan dilakukan secara etis guna terciptanya lingkungan kerja yang baik. Manajemen puncak juga perlu memberikan contoh kepada karyawan untuk bersikap etis agar dapat terciptanya lingkungan etis dan tidak ada toleransi bagi pelaku yang melakukan pelanggaran etis.

Penelitian yang dilakukan oleh Oboh (2019) meneliti terkait perilaku tidak etis yang dilakukan oleh akuntan di Nigeria. Terdapat kasus skandal keuangan dan tingkat korupsi yang tinggi pada sektor publik dan sektor swasta. Hal ini berdampak pada tingkat perekonomian negara. Walaupun pemerintah Nigeria telah membuat diversifikasi ekonomi negara dan berupaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetap saja tidak dapat menurunkan tingkat kemiskinan secara signifikan. Tercatat sekitar 62 persen (lebih dari 111,6 juta) warga Nigeria masih hidup dalam kemiskinan.

Kasus pelanggaran etika lainnya yang dilakukan oleh akuntan adalah manipulasi laporan keuangan. Kebebasan yang diberikan kepada profesi akuntansi dapat digunakan untuk memanipulasi laporan keuangan suatu organisasi (Safta et al., 2020). Laporan keuangan merupakan informasi terkait kondisi keuangan suatu perusahaan yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi (Hyblova et al., 2022). Sedangkan, manipulasi laporan keuangan adalah perekayasaan keuangan yang dilakukan secara sadar dan disengaja oleh individu atau perusahaan dalam

laporan keuangan, melalui penambahan atau pengurangan informasi dengan tujuan menyesatkan pengguna informasi keuangan (Atabay & Dinç, 2020).

Manipulasi laporan keuangan dapat terjadi karena adanya kesalahan dalam penyajian laporan keuangan dan penyelewengan aset yang dilakukan secara sengaja atau pun tidak sengaja. Manipulasi laporan keuangan dilakukan untuk pencitraan, mendapatkan insentif yang besar, atau menutupi kondisi keuangan perusahaan. Manipulasi laporan keuangan juga digunakan oleh pemerintah untuk menyesuaikan kinerja keuangan terkait persaingan politik dan karakteristik birokrat pengelola keuangan (Handayani et al., 2022). Adanya manipulasi laporan keuangan akan berdampak buruk bagi publik dan investor, karena mereka sangat bergantung pada laporan keuangan dalam pengambilan suatu keputusan (Pasaribu et al., 2020).

Manipulasi laporan keuangan tidak hanya terjadi di sektor swasta saja, namun dapat terjadi juga di sektor pemerintahan. Salah satu kasus manipulasi keuangan yang terjadi di lingkup pemerintahan di Indonesia yaitu terjadi pada kasus korupsi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK) di Banda Aceh. Berdasarkan hasil temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), total kerugian yang harus ditanggung oleh negara yakni sebesar Rp2,8 miliar lebih. Manipulasi laporan keuangan ini terjadi karena adanya kasus penyalahgunaan kekuasaan, peluang atau sarana yang dimiliki karena jabatan atau kedudukan. Manipulasi laporan keuangan yang

dilakukan oleh bendahara pengeluaran bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi (Beritakini.co, 2023).

Allah telah memerintahkan manusia agar senantiasa berberbuat kejujuran dan menghindari perilaku buruk yang akan memberikan kerugian pada diri sendiri, maupun orang lain. Hal tersebut tercantum dalam firman Allah dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 42:

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

“Dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan dan (janganlah) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya.” (QS. Al-Baqarah (2): 42)

Ayat tersebut menjelaskan mengenai perintah Allah kepada seluruh umat manusia agar senantiasa berbuat kebenaran dan bersikap jujur. Allah memerintahkan kepada umat manusia agar tidak melakukan perilaku buruk dan menutup-nutupi kebohongan. Seseorang yang memiliki sifat jujur, maka dapat dipercaya dalam perkataan, pekerjaan, dan perilaku (Muhammad, 2022). Individu yang berbuat kebenaran maka akan berdampak pada etika yang dimilikinya.

Ideologi etika merupakan sebuah sistem etis yang digunakan untuk membuat penilaian moral yang mengacu pada penilaian dan penyelesaian perilaku yang mungkin sering dipertanyakan secara etis (Henle et al., 2005). (Schlenker & Forsyth, 1977) dan (Forsyth, 1980a) mengemukakan bahwa ideologi moral terbagi menjadi dua, yakni idealisme moral dan relativisme

moral. Idealisme moral merupakan keyakinan moral yang menyatakan bahwa nilai etis terlepas dari situasi, keadaan, atau pengaruh apa pun, sedangkan relativisme moral merupakan keyakinan moral yang menyatakan bahwa nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip etika berhubungan terhadap individu, budaya, dan norma-norma sosial (Oboh, 2019).

Idealisme moral menggambarkan kepedulian individu terhadap kesejahteraan orang lain. Individu yang memiliki sifat idealis, maka akan selalu bertindak benar dan tidak menyukai tindakan yang menimbulkan konsekuensi buruk bagi orang lain. Sedangkan, relativisme moral mengarah pada sejauh mana seseorang menentang aturan moral. Individu tersebut menganggap bahwa tindakan moral tergantung pada sifat yang berasal dari situasi dan individu yang terlibat, serta ketika akan membuat penilaian etis mereka akan mempertimbangkan keadaan dan pelanggaran terhadap prinsip etika (Ismail & Rasheed, 2019).

Menurut Oboh (2019), intensitas moral memiliki enam konsep dimensi, salah satunya yaitu besaran konsekuensi. Menurut Hilmer et al (2003), besaran konsekuensi merupakan besarnya konsekuensi dari tingkat bahaya yang dihasilkan dari tindakan tertentu. Konsekuensi yang diperoleh yakni konsekuensi positif dan negatif. Besaran konsekuensi menunjukkan hubungan terkuat dengan proses pengambilan keputusan etis. Karyawan biasanya akan dihargai jika memiliki kinerja yang baik atau mendapatkan konsekuensi atas perilaku yang tidak sesuai dengan kebijakan suatu

organisasi. Besaran konsekuensi menentukan besarnya konsekuensi yang akan diterima oleh karyawan tersebut.

Penilaian etis merupakan sejauh mana perilaku tertentu dianggap etis oleh seseorang sebagai penilaian etis individu dalam mengevaluasi kebenaran dari suatu tindakan dan penerimaan individu terhadap filosofi moral harus menjadi kunci. Pengakuan etis juga merupakan hal yang penting dalam penilaian etika. Pengakuan etis merupakan kepekaan etika terhadap isu suatu permasalahan dalam membuat keputusan. Pengakuan etis berkontribusi dalam menjelaskan perbedaan dalam perilaku etis (Singhapakdi et al., 1996). Pengakuan etis memerlukan kemampuan individu untuk mengetahui keputusan atau pengambilan keputusan dapat mempengaruhi kesejahteraan, kepentingan, dan harapan orang lain yang mungkin bertentangan dengan kode etik (Oboh, 2019).

Pengakuan etis dapat digunakan untuk membantu pengambilan keputusan etis karena individu harus mampu mengenali tindakan atau keputusan yang diambilnya. Individu harus mampu memahami situasi mengenai keputusan yang diambil karena hal ini melibatkan kemampuan untuk menilai apakah keputusan yang diambil berpengaruh atau tidak terhadap orang lain (Oboh et al., 2020). Kepekaan etis merupakan murni kemampuan untuk mengenali isu-isu etis (Singhapakdi et al., 1996). (Musbah et al., 2016) menemukan hubungan signifikan antara penilaian etis dengan pengakuan etis.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Obloh, 2019) tidak meneliti mengenai perilaku etis karena mengalami kesulitan dan bias dalam pengukuran. Penelitian tersebut berfokus pada organisasi sektor publik dan swasta di Nigeria. Pada penelitian yang dilakukan oleh Mohd Ghazali (2021) juga belum menganalisis faktor apa saja yang dapat mempengaruhi penilaian etis. Penelitian tersebut berfokus pada sektor pemerintahan di Malaysia.

Penelitian ini dilandasi oleh teori *moral development* (teori perkembangan moral). Teori perkembangan moral adalah teori yang dikembangkan oleh Kohlberg (1973). Pertimbangan utama dalam teori ini yaitu menghubungkan perkembangan moral kognitif dan studi tentang pengambilan keputusan etis. Pada teori ini mengajarkan bagaimana moral dapat berhubungan dengan pengambilan keputusan dan perilaku. Penelitian ini menggunakan *moral development theory* untuk menganalisis hubungan antara idealisme moral, relativisme moral, dan besaran konsekuensi terhadap penilaian etis dengan pengakuan etis sebagai variabel intervening.

Penelitian ini diadaptasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Obloh (2019) dengan menambahkan variabel pengakuan etis sebagai variabel intervening. Pengakuan etis dipilih sebagai variabel intervening untuk menjadi kebaruan dari penelitian ini, karena masih belum banyak diteliti. Penambahan pengakuan etis bertujuan untuk memperkuat penilaian etis dalam pengambilan keputusan. Pengakuan etis merupakan tahap pengenalan etika yang memungkinkan individu untuk menyadari, bahwa

suatu keputusan dapat mempengaruhi kepentingan orang lain secara langsung atau tidak langsung. Pada tahap ini digunakan sebagai proses pengambilan keputusan etis. Hal ini memungkinkan individu untuk menyadari permasalahan etis yang terjadi, sehingga berpengaruh terhadap penilaian etis (Oboh, 2019). Selain itu, dengan menambahkan pengakuan etis bertujuan agar perkembangan model penelitian menjadi lebih komperhensif dalam penelitian etis.

Berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini berfokus pada pengaruh perilaku etis terhadap penilaian etis di organisasi sektor publik, yakni pemerintahan di daerah Kabupaten Karawang. Penelitian ini dilakukan lantaran banyaknya kasus pelanggaran etis yang dilakukan oleh akuntan di sektor publik dan sektor swasta. Sehingga, hal ini dapat menjadi motivasi untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH IDEALISME MORAL, RELATIVISME MORAL, DAN BESARAN KONSEKUENSI TERHADAP PENILAIAN ETIS DENGAN PENGAKUAN ETIS SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Studi Empiris pada Pegawai di Instansi Pemerintahan Kabupaten Karawang)”**.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Perilaku etis yang dilakukan oleh individu untuk kepentingan dirinya sendiri saat ini masih sering kali terjadi. Hal ini, disebabkan karena minimnya moral yang dimiliki individu itu sendiri. Berdasarkan uraian latar

belakang yang telah dijelaskan, dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah idealisme moral berpengaruh positif terhadap pengakuan etis?
2. Apakah relativisme moral berpengaruh positif terhadap pengakuan etis?
3. Apakah besaran konsekuensi berpengaruh positif terhadap pengakuan etis?
4. Apakah pengakuan etis berpengaruh positif terhadap penilaian etis?
5. Apakah idealisme moral berpengaruh positif terhadap penilaian etis?
6. Apakah relativisme moral berpengaruh positif terhadap penilaian etis?
7. Apakah besaran konsekuensi berpengaruh positif terhadap penilaian etis?
8. Apakah idealisme moral berpengaruh positif terhadap penilaian etis dengan pengakuan etis sebagai variabel intervening?
9. Apakah relativisme moral berpengaruh positif terhadap penilaian etis dengan pengakuan etis sebagai variabel intervening?
10. Apakah besaran konsekuensi berpengaruh positif terhadap penilaian etis dengan pengakuan etis sebagai variabel intervening?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh positif idealisme moral terhadap pengakuan etis?

2. Untuk menguji secara empiris pengaruh positif relativisme moral terhadap pengakuan etis?
3. Untuk menguji secara empiris pengaruh positif besaran konsekuensi terhadap pengakuan etis?
4. Untuk menguji secara empiris pengaruh positif pengakuan etis terhadap penilaian etis?
5. Untuk menguji secara empiris pengaruh positif idealisme moral terhadap penilaian etis?
6. Untuk menguji secara empiris pengaruh positif relativisme moral terhadap penilaian etis?
7. Untuk menguji secara empiris pengaruh positif besaran konsekuensi terhadap penilaian etis?
8. Untuk menguji secara empiris pengaruh positif idealisme moral terhadap penilaian etis dengan pengakuan etis sebagai variabel intervening?
9. Untuk menguji secara empiris pengaruh positif relativisme moral terhadap penilaian etis dengan pengakuan etis sebagai variabel intervening?
10. Untuk menguji secara empiris pengaruh positif besaran konsekuensi terhadap penilaian etis dengan pengakuan etis sebagai variabel intervening?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan akan memperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi instansi pemerintah maupun swasta dalam mengevaluasi etika dan moral yang dimiliki oleh pegawai perusahaan guna meningkatkan integritas pada akuntan. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi dalam bidang akademik akuntansi, khususnya pada mata kuliah Akuntansi Sektor Publik dan Akuntansi Manajemen Keperilakuan. Dengan adanya penelitian ini, suatu organisasi dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap akuntan terkait penilaian etis guna mensejahterakan organisasi tersebut dan berkurangnya perilaku penyimpangan etika yang dilakukan oleh seorang akuntan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan perilaku moral dan etika pada karyawan di Pemerintahan Kabupaten Karawang, terutama pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam mengelola pelaporan keuangan.

b. Bagi Perguruan Tinggi

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pembelajaran akademik yang berkaitan dengan penilaian etis di instansi pemerintah maupun swasta.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan akuntan, serta memberikan pemahaman mengenai pentingnya penilaian etis.

d. Bagi Pegawai Keuangan

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan motivasi dan menjadikan pembelajaran terkait dengan perilaku para pegawai kedepannya. Selain itu, pegawai senantiasa untuk selalu mematuhi kode etik yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan.